

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 September 2019/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **GUNARDI**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
3. NHK : **713708**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **450.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 29 m2/70 m2 di KOTA SEMARANG ,
LAINNYA Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 29 m2/70 m2 di KOTA SEMARANG ,
LAINNYA Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 45 m2/78 m2 di KOTA SEMARANG ,
LAINNYA Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **139.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA 1KP A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000
2. MOTOR, HONDA NF 125 TR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000
3. MOTOR, HONDA D1A02N18M1 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 7.000.000
4. MOTOR, HONDA Y3B02R17L0 M/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 13.000.000
5. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA 1.3G M/T Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 112.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **---****D. SURAT BERHARGA** **Rp.** **---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp.** **553.159.665****F. HARTA LAINNYA** **Rp.** **---**



Sub Total	Rp.	1.142.159.665
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.142.159.665

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.